

Book Review

Judul Buku : *Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren (Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Assalam Surakarta)*
Penulis : Dr. Abdullah Aly, M.Ag
Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Cetakan : Pertama, Februari 2011
Tebal : xiii + 368 halaman + indeks

MEMBUMIKAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI PESANTREN

Saiful Amin Ghofur

Universitas Islam Indonesia
Email: saifulaminghofur@gmail.com

A. Pendahuluan

Citra pesantren sempat jatuh di titik nadir saat serangkaian aksi terorisme yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia dihubungkan dengan lembaga pendidikan tertua di Indonesia ini. Pesantren lantas diasumsikan sebagai sarang teroris, sebab banyaknya alumni pesantren—terutama pesantren di Solo—yang menganut paham keagamaan ekstrim atau Islam radikal, sampai nekat melakukan aksi bom bunuh diri. Padahal, jika ditilik ke belakang, keberadaan pesantren memberi corak warna humanis dalam dinamika sejarah keindonesiaan yang tampil di garda depan dalam upaya kelangsungan penyebaran Islam yang *rahmatan lilalamin*. Pesantren memang lembaga pendidikan Islam yang memiliki corak khas Indonesia. karena berhubungan erat dengan sejarah dan proses penyebaran Islam di Indonesia.

Sejak tahap-tahap awal pengembangan Islam di Nusantara, para ulama pelaksana misi dakwah Islam, termasuk Wali Songo, telah melakukan dakwah di tengah bangsa kita melalui pendekatan beraneka ragam: ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, dan lain sebagainya. Pelaksanaan dakwah ini, pada mulanya mereka lakukan dengan cara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan cara ini, mereka mampu menangani langsung problem umat secara kondisional dan regional, sehingga Islam kemudian dikenal dan dipeluk oleh berbagai lapisan masyarakat dan suku di Nusantara.¹

¹ Ulasan detail lihat, KH. Mohammad Tidjani Djauhari, MA, *Masa Depan Pendidikan Pesantren: Agenda yang Belum terselesaikan*, (Jakarta: Taj Publishing, 2008).

Karena itulah, tudingan pesantren sebagai sarang teroris perlu mendapat perhatian serius. Meski tudingan itu tidak berlaku bagi semua pesantren di Indonesia, namun tak bisa dipungkiri bahwa stigma negatif tersebut juga berimbas meluas. Maka, pertanyaan mendasar yang mencuat adalah bagaimana aplikasi kurikulum pesantren yang melahirkan alumni berpaham keagamaan Islam radikal.

B. Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan

Selain sebagai lembaga dakwah, pesantren juga mengemban fungsi utama sebagai lembaga pendidikan. Fungsi ini memiliki dua misi: *Pertama*, pendidikan umat secara umum untuk mendidik dan menyiapkan pemuda-pemudi Islam menjadi umat berkualitas (*khaira ummah*) pelaksana misi amar ma'ruf nahi munkar dan generasi yang shalih. *Kedua*, sebagai lembaga pendidikan pengkaderan ulama, *agent of excellence*, dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Dalam hal ini, tugas pesantren adalah mendidik dan menyiapkan *thâ'ifah mutafaqqihah fid-dîn*, yaitu kader-kader ulama/pengasuh pesantren yang mampu mewarisi sifat dan kepribadian para Nabi, serta siap melaksanakan tugas kemanusiaan.²

Selain itu, pesantren juga dituntut untuk berusaha mengembalikan citra serta fungsi lembaga-lembaga pendidikan Islam sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan agama, sebagai realisasi dari wahyu Allah pertama (*iqra'!*). Dalam misi ini, terselip harapan agar pesantren menjadi tempat rujukan masyarakat dalam menjawab permasalahan-permasalahan keseharian mereka berdasarkan perspektif dan pandangan agama.³

Sejarah mencatat, pondok pesantren yang telah berdiri sezaman dengan masuknya Islam ke Indonesia, dan merupakan hasil dari proses akulturasi damai antara ajaran Islam yang dibawa para wali dan pedagang yang umumnya bernuansa mistis, dengan budaya asli (*indigenous culture*) bangsa Indonesia yang bersumber dari agama Hindu dan Buddha. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, pesantren yang berdiri di pusat-pusat kekuasaan dan perdagangan merupakan satu-satunya sistem pendidikan yang berfungsi sebagai lembaga kaderisasi bagi para putera pembesar kerajaan dan tokoh masyarakat. Pada masa kekuasaan Raja Sultan Agung Mataram, pesantren bahkan sudah mampu menerapkan sistem pendidikan berjenjang, dari pendidikan

² Mustofa Bisri, "Pesantren dan Pendidikan" dalam *Majalah Tebuireng*, Edisi 1 Tahun I Juli-September 2007.

³ Abdurrahman Mas'ud, "Memahami Agama Damai Dunia Pesantren" dalam Badrus Sholeh (ed), *Budaya Damai Komunitas Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 2007), hal. 75.

terendah, menengah, tinggi dan takhassus. Walau tidak ada peraturan wajib belajar, dalam budaya Indonesia masa lalu, anak yang berusia tujuh tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan, harus dipesantrenkan di desanya.

Pada masa penjajahan Belanda, terjadi stigmatisasi pesantren secara kontinu dan sistematis, yang dipropagandai oleh penjajah melalui kekuasaan mereka. Di samping Misi khusus kaum kolonial dalam kepentingan kekuasaan, militer, ekonomi dan budaya, mereka juga mengemban misi misionari, yang dimotori oleh kelompok Calvinis Puritan. Perlakuan diskriminatif tentara kulit putih (penjajah) versus pribumi, priyayi versus rakyat biasa, Kristen versus Islam, dan tekanan-tekanan terhadap pesantren yang terjadi di masa ini, akhirnya memaksa pesantren untuk pindah dari kota ke desa hingga dampak psikologis yang negatif pun tidak terhindarkan. Seperti munculnya kecenderungan inferior, inkonfiden, inklusif, fanatik dan lain sebagainya.

Menyikapi perlakuan diskriminatif dan kezhaliman ini, pesantren terus bertahan dan melawan dalam bentuk sikap non-kooperatif, *'uzlah*, bahkan perlawanan bersenjata atau *jihâd fîsabilillâh*. Bisa dicatat di sini sebagai contoh perjuangan Pangeran Diponegoro di Jawa, pemberontakan umat Islam di Banten, perjuangan Paderi di Sumatera Barat dan Aceh. Karena peran inilah, maka konon menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara pernah mengusulkan agar pendidikan pesantren dijadikan sistem pendidikan nasional.⁴

Sebagai imbas dari dampak psikologis yang timbul dari hasil propaganda kolonial di atas, maka pada era pascakemerdekaan muncullah dikotomi yang sungguh ironis dan amat merugikan hubungan harmonis masyarakat Indonesia. Yaitu dikotomi kaum santri dan abangan. Peran pesantren pun diliputi pandangan sinis dan melecehkan, hingga tercuatlah upaya sistematis yang bertujuan melakukan kembali stigmatisasi Pesantren.

Dari hasil penilaian tidak adil ini maka lahirlah UU sistem pendidikan yang merugikan Pesantren. Mulai dari UU no. 4 tahun 1950, UU no. 14 PRPS tahun 1965, UU no. 19 PNPS, hingga UU SPN no. 2 tahun 1989. Kesemuanya tidak mencantumkan pengakuan formal terhadap pendidikan pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, dan menafikan jasa berabad-abad pesantren dalam pembentukan sistem pendidikan nasional.⁵

⁴ KH. Mohammad Tidjani Djauhari, MA, *Masa Depan Pendidikan Pesantren...*, hal. 132-133.

⁵ *Ibid.*

Namun, kenyataan faktual saat ini justru tengah menunjukkan kian kuat, besar dan pentingnya peran Pesantren. Terbukti dengan makin menjamurnya kemunculan Pondok-pondok pesantren dengan berbagai corak, nama, sistem dan tingkatan pendidikan, bukan hanya di pedesaan tetapi juga di perkotaan. Minat para orang tua untuk mengirimkan putra-putrinya ke pesantren juga kian meningkat, termasuk di kalangan elit masyarakat.

Dari hasil pengamatan dan kajian, para pakar dan pemerhati pendidikan, keunggulan sistem pendidikan pesantren ini telah diakui. Produk pendidikan pesantren pun kini telah banyak bermunculan menjadi tokoh penting dalam berbagai sektor pembangunan, dan terbukti mampu memberi kontribusi sangat besar bagi bangsa. Ditambah lagi dengan adanya pengakuan persamaan (akreditasi) pendidikan pondok pesantren oleh dunia pendidikan luar negeri, dan jalinan kerjasama antara pondok pesantren dengan dunia internasional yang terus terjalin mulus. Hingga tak ayal jika banyak tokoh-tokoh internasional berminat menjadikan pesantren sebagai objek penelitian mereka, bersamaan dengan meningkatnya minat santri-santri mancanegara untuk belajar di pesantren.

C. Multikulturalisme dalam Pendidikan

Sebagai sebuah cara pandang sekaligus gaya hidup, multikulturalisme menjadi gagasan yang cukup kontekstual dengan realitas masyarakat kontemporer saat ini. Prinsip mendasar tentang kesetaraan, keadilan, keterbukaan, pengakuan terhadap perbedaan adalah prinsip nilai yang dibutuhkan manusia di tengah himpitan budaya global. Oleh karena itu, sebagai sebuah gerakan budaya, multikulturalisme adalah bagian integral dalam pelbagai sistem budaya dalam masyarakat yang salah satunya dalam pendidikan, yaitu melalui pendidikan yang berwawasan multikultural.

Pendidikan dengan wawasan multikultural dalam rumusan James A. Bank adalah konsep, ide atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan (*set of believe*) dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis di dalam membentuk membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara.⁶ Sementara menurut Sonia Nieto, pendidikan multikultural adalah proses pendidikan yang komperhensif dan mendasar bagi semua peserta didik. Jenis

⁶ James A. Bank dan Cherry A. McGee (ed). *Handbook of Research on Multicultural Education*, (San Francisco: Jossey-Bass, 2001), hal. 28.

pendidikan ini menentang bentuk rasisme dan segala bentuk diskriminasi di sekolah, masyarakat dengan menerima serta mengafirmasi pluralitas (etnik, ras, bahasa, agama, ekonomi, gender dan lain sebagainya) yang terefleksikan di antara peserta didik, komunitas mereka, dan guru-guru. Menurutnya, pendidikan multikultur ini haruslah melekat dalam kurikulum dan strategi pengajaran, termasuk juga dalam setiap interaksi yang dilakukan di antara para guru, murid dan keluarga serta keseluruhan suasana belajar mengajar.

Karena jenis pendidikan ini merupakan pedagogi kritis, refleksi dan menjadi basis aksi perubahan dalam masyarakat, pendidikan multikultural mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi dalam berkeadilan sosial.⁷ Sementara itu, Bikhu Parekh mendefinisikan pendidikan multikultur sebagai “an education in freedom, both in the sense of freedom from ethnocentric prejudices and biases, and freedom to explore and learn from other cultures and perspectives”.⁸

Dari beberapa dua definisi di atas, hal yang harus digarisbawahi dari diskursus multikulturalisme dalam pendidikan adalah identitas, keterbukaan, diversitas budaya dan transformasi sosial. Identitas sebagai salah satu elemen dalam pendidikan mengandaikan bahwa peserta didik dan guru merupakan satu individu atau kelompok yang merepresentasikan satu kultur tertentu dalam masyarakat. Identitas pada dasarnya inheren dengan sikap pribadi ataupun kelompok masyarakat, karena dengan identitas tersebutlah, mereka berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain, termasuk pula dalam interaksi antar budaya yang berbeda. Dengan demikian dalam pendidikan multikultur, identitas-identitas tersebut diasah melalui interaksi, baik internal budaya (*self critic*) maupun eksternal budaya. Oleh karena itu, identitas lokal atau budaya lokal merupakan muatan yang harus ada dalam pendidikan multikultur.

Dalam masyarakat ditemukan berbagai individu atau kelompok yang berasal dari budaya berbeda, demikian pula dalam pendidikan, diversitas tersebut tidak bisa dielakkan. Diversitas budaya itu bisa ditemukan di kalangan peserta didik maupun para guru yang terlibat -secara langsung atau tidak- dalam satu proses pendidikan. Diversitas itu juga bisa ditemukan melalui pengayaan budaya-budaya lain yang ada dan berkembang dalam konstelasi budaya, lokal, nasional dan global.

⁷ Sonia Nieto, *Language, Culture and Teaching* (Mahwah, NJ: Lawrence Earlbaum, 2002), hal. 29.

⁸ Bikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, (Cambridge: Harvard University Press, 2000), hal. 230.

Oleh karena itu, pendidikan multikultur bukan merupakan satu bentuk pendidikan monokultur, akan tetapi model pendidikan yang berjalan di atas rel keragaman. Diversitas budaya ini akan mungkin tercapai dalam pendidikan jika pendidikan itu sendiri mengakui keragaman yang ada, bersikap terbuka (*openess*) dan memberi ruang kepada setiap perbedaan yang ada untuk terlibat dalam satu proses pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, Banks menjelaskan lima dimensi yang harus ada yaitu, *pertama*, adanya integrasi pendidikan dalam kurikulum (*content integration*) yang di dalamnya melibatkan keragaman dalam satu kultur pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghapus prasangka. *Kedua*, konstruksi ilmu pengetahuan (*knowledge construction*) yang diwujudkan dengan mengetahui dan memahami secara komperhensif keragaman yang ada. *Ketiga*, pengurangan prasangka (*prejudice reduction*) yang lahir dari interaksi antarkeragaman dalam kultur pendidikan. *Keempat*, pedagogik kesetaraan manusia (*equity pedagogy*) yang memberi ruang dan kesempatan yang sama kepada setiap elemen yang beragam. *Kelima*, pemberdayaan kebudayaan sekolah (*empowering school culture*). Hal yang kelima ini adalah tujuan dari pendidikan multikultur yaitu agar sekolah menjadi elemen pengentas sosial (transformasi sosial) dari struktur masyarakat yang timpang kepada struktur yang berkeadilan.⁹

Sementara itu, H.A.R. Tilaar menggarisbawahi bahwa model pendidikan yang dibutuhkan di Indonesia harus memperhatikan enam hal, yaitu, *pertama*, pendidikan multikultural haruslah berdimensi “right to culture” dan identitas lokal. *Kedua*, kebudayaan Indonesia yang menjadi, artinya kebudayaan Indonesia merupakan *Weltanshauung* yang terus berproses dan merupakan bagian integral dari proses kebudayaan mikro. Oleh karena itu, perlu sekali untuk mengoptimisasikan budaya lokal yang beriringan dengan apresiasi terhadap budaya nasional. *Ketiga*, pendidikan multikultural normatif yaitu model pendidikan yang memperkuat identitas nasional yang terus menjadi tanpa harus menghilangkan identitas budaya lokal yang ada. *Keempat*, pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial, artinya pendidikan multikultural tidak boleh terjebak pada xenophobia, fanatisme dan fundamentalisme, baik etnik, suku, ataupun agama. *Kelima*, pendidikan multikultural merupakan pedagogik pemberdayaan (*pedagogy of empowerment*) dan pedagogik kesetaraan dalam kebudayaan yang beragam (*pedagogy of equity*).

⁹ James A. Banks. “Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, and Practice” dalam James A. Banks dan Cherry A. McGee, *Handbook of Research on Multicultural Education...*, hal. 3-24.

Pedagogik pemberdayaan pertama-tama berarti, seseorang diajak mengenal budayanya sendiri dan selanjutnya digunakan untuk mengembangkan budaya Indonesia di dalam bingkai negara-bangsa Indonesia. Dalam upaya tersebut diperlukan suatu pedagogik kesetaraan antarindividu, antarsuku, antaragama dan beragam perbedaan yang ada. Keenam, pendidikan multikultural bertujuan mewujudkan visi Indonesia masa depan serta etika bangsa. Pendidikan ini perlu dilakukan untuk mengembangkan prinsip-prinsip etis (moral) masyarakat Indonesia yang dipahami oleh keseluruhan komponen sosial-budaya yang majemuk.¹⁰

D. Realitas Multikultural Di Pesantren

Pesantren adalah tempat hunian santri yang tidak hanya berasal dari satu daerah, tetapi dari berbagai daerah.¹¹ Kenyataan ini menyertakan implikasi bawaan yang beragam. Perbedaan latar geografis sudah tentu menyebabkan perbedaan kultur masing-masing santri. Sebab tak bisa dipungkiri bahwa tiap daerah memiliki kultur yang berbeda dengan kultur daerah lain.¹²

Dalam perspektif sosiologis, perbedaan kultur tersebut disebabkan oleh aturan, tata nilai, dan adat istiadat yang berlaku dan disepakati oleh masyarakat setempat. Dengan kata lain, karakteristik lokal menjadi semacam mesin yang mengkonstruksi masyarakat untuk setia memegang teguh aturan kultural daerahnya. Fakta inilah yang menyebabkan setiap orang merasa perlu untuk menjunjung tinggi kultur yang melingkupinya dengan penuh khidmat dan tanggung jawab.

Modal sosial kultural inilah yang dibawa masing-masing santri datang ke pesantren. Dengan membawa nuansa kedaerahan masing-masing para santri lantas membaur dalam satu tempat dan berinteraksi secara sinergis di dalamnya. Di

¹⁰ H.A.R. Tilaar, "Multikulturalisme; Tantangan-Tantangan Global Masa Depan" dalam *Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hal. 185-190.

¹¹ Asumsi ini berangkat dari observasi terhadap sejumlah pesantren. Tentu saja, pesantren tersebut adalah pesantren yang telah dimafhumi keberadaannya. Ini artinya, asumsi tersebut mengeluarkan keberadaan pesantren lokal (kampung) yang hanya mampu menyedot animo masyarakat yang berada di sekeliling pesantren tersebut untuk *nyantri* di sana.

¹² Perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Tiap daerah memiliki ciri khas, baik dari sisi budaya, ekonomi, sosial, maupun bahasa. Untuk yang terakhir, bahasa biasanya menjadi simbol pengikat rasa etnisitas dan primordialitas. Dengan berpegang pada bahasa, ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang berasal dari daerah yang sama seketika merasa menjadi akrab—meskipun pada mulanya tidak kenal sama sekali. Hal ini mengakibatkan menebalkan rasa simpati dan solidaritas sosial. Lebih jelas tentang uraian bahasa, lihat Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 171-188.

pesantren, identitas kedaerahan tidaklah sirna, tetapi tetap kentara. Maka tak heran jika di pesantren muncul suatu kelompok berbasis ikatan etnis kedaerahan dengan bersandar pada semangat primordialitas. Di Pesantren Krapyak, misalnya, para santri yang berasal dari Jawa Timur mendirikan wadah yang bernama Ikatan Santri se-Jawa Timur yang diakronimkan menjadi Insan Sejati. Di Pesantren Beratkulon Mojokerto juga muncul fenomena serupa. Para santri dari Madura mendirikan komunitas santri Madura dengan nama Himpunan Santri Madura (HIMSAMA).¹³

Fakta tersebut hanyalah sekelumit contoh kecil di mana kultur kedaerahan masih mengental dalam dinamika kehidupan pesantren. Kelompok santri berbasis etnis-primordial tersebut bukan berarti tidak penting jika dilihat dari perspektif upaya membangun soliditas kekerabatan etnis. Hanya saja, yang menjadi persoalan adalah ketika kelompok tersebut diperhadapkan secara diametral dengan kelompok lain yang sejenis. Dikhawatirkan bila interaksi sesama santri saban harinya suatu saat mengalami ketegangan yang dipicu oleh suatu hal akan timbul konflik. Pada gilirannya ketegangan itu akan merembet menjadi konflik etnis. Terlepas dari kekhawatiran tersebut, yang perlu digarisbawahi adalah fenomena multikultural jelas sekali ditemukan di pesantren. Keragaman kultur itu menjadi hal yang niscaya mengingat latar geografis santri yang berbeda-beda.

Apabila proposisi ini ditarik dalam ranah yang lebih sempit, fenomena multikultural juga dijumpai pada keragaman potensi dan talenta yang dimiliki santri. Meski seluruh santri mengikuti proses pendidikan dengan materi yang sama, namun ada hal yang tak boleh diabaikan, yakni ketertarikan santri terhadap materi tersebut tentu tak sama. Setiap santri memiliki potensi dan talenta yang berbeda antara satu dan lainnya. Karena itu, wajar jika ada santri yang sangat tekun mempelajari ilmu fikih, misalnya, sementara santri yang lain begitu antusias belajar ilmu gramatika bahasa (baca: nahwu dan saraf). Atau juga seorang santri yang giat belajar menjadi orator keagamaan untuk berdakwah secara lisan, sedangkan santri lain getol menekuni dunia tulis-menulis untuk berdakwah lewat tulisan. Dalam konteks demikian, tentunya perlu usaha serius untuk merumuskan strategi pendidikan yang tepat guna.

¹³ Penulis pernah melakukan studi tentang kenapa ikatan primordialitas santri terbentuk. Dari studi itu ditemukan jawaban bahwa berdirinya ikatan primordialitas santri itu ternyata bertujuan untuk membangun keakraban santri yang berasal dari daerah yang sama. Lihat Saiful Amin Ghofur, "Fenomena Ikatan Etnis di Pesantren" dalam *Majalah Klompen*, edisi II Juni-September 2004, hal. 25-30.

E. Pendidikan Multikultural Di Pesantren

Pesantren sebagai lembaga pendidikan dan kemasyarakatan, memiliki masa depan yang sangat menentukan keberadaan setiap individu santri dan masyarakat lingkungannya. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memberikan materi keagamaan (Islam), mampu mengubah sikap dan karakter pribadi setiap santri sehingga mampu beradaptasi dan membangun daerahnya dengan keilmuagamaan yang dimilikinya. Sebagai lembaga kemasyarakatan, pesantren amat menentukan dalam menciptakan keharmonisan lingkungan. Suatu pesantren akan memperoleh penghormatan tinggi dari lingkungannya adalah karena keharmonisan semua sub sistem yang ada.

Sebaliknya, pesantren akan semakin dikucilkan oleh lingkungannya adalah karena tidak berfungsi sebagaimana fungsi keagamaan dan kemasyarakatan. Ketidakberfungsian keagamaan dan kemasyarakatannya itulah yang dimaksud sebagai tantangan bagi setiap pondok pesantren, sehingga akan dikucilkan dan dijauhi oleh masyarakat setempat khususnya dan para orang tua santri umumnya.

Beberapa istilah yang mencerminkan ciri khas nilai-nilai yang mentradisi dalam pondok pesantren yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, dan ukhuwwah Islâmiah . Selain empat nilai yang terkenal ini, masih banyak nilai-nilai agama dalam pondok pesantren yang dapat membentuk kepribadian manusia berkualitas tinggi.¹⁴

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang sarat nilai, karena itu dapat dikatakan bahwa pesantren adalah pranata pendidikan yang di selenggarakan oleh masyarakat yang berbeda dari lembaga atau kelompok pendidikan lainnya dalam berbagai aspek. Pondok pesantren merupakan sistem pendidikan yang terpadu antara pendidikan luar sekolah dan pendidikan sekolah yang mempunyai ciri khas yang berbeda, baik dalam prosesnya maupun produknya. Ciri khas tersebut terlihat dari kualitas manusia di tengah-tengah masyarakat yaitu: kemandirian, ketangguhan, kesederhanaan, tanggung jawab, pantang putus asa, kesabaran, kerja keras, penghargaan terhadap waktu, disiplin diri, kemampuan bergaul dengan baik, kreatif dan inovatif, beretos kerja, dan lain- lainnya.

Dari ilustrasi diatas, dapat diakui bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang efektif untuk menanamkan sikap, perilaku dan akhlak mulia kepada

¹⁴ Misbahul Munir, "Pesantren Kawah Candradimuka Pendidikan Multikultural", dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. I, No. 1, Juni 2009, hal. 5-6.

para peserta didik. Bahkan dalam bidang bahasa, pesantren dianggap sebagai lembaga yang paling efektif untuk mempraktekkan sekaligus meningkatkan kemampuan berbahasa asing seperti Arab dan Inggris.

Keberhasilan ini, pesantren dapat dijadikan sebagai model penerapan pendidikan multikultural. Pesantren sebagai kawah candradimuka multikulturalisme. Hal ini didasari *pertama*, dunia pesantren telah berkenalan dengan keragaman pendapat sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab kuning. *Kedua*, pesantren—melalui kyainya— sebagai agen budaya masyarakat setempat [agent of cultur broker]. *Ketiga*, pesantren berada dalam masyarakat budaya Indonesia yang beragam.

Dalam konteks inilah, penelitian Abdullah Aly yang dibukukan dengan judul *Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren (Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta)* ini menemukan signifikansinya. Dalam penelitiannya ini, Abdullah Aly menemukan nilai dasar dari kurikulum pendidikan di PPMI Assalaam adalah kemajemukan, yaitu pendidikan multikultural yang menembus sekat-sekat perbedaan. Abdullah Aly mengemukakan bahwa betapa sikap menerima, mengakui, dan menghargai keragaman adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh civitas akademika PPMI Assalaam Surakarta.¹⁵

Klaim tentang adanya doktrin Islam Radikal pun terbantahkan. Secara rinci, Abdullah Aly menjabarkan kurikulum pendidikan dan mata pelajaran yang diajarkan di PPMI Assalaam. Bahkan PPMI Assalaam mempunyai misi yang sama dengan pesantren-pesantren lainnya dalam ranah memajukan pendidikan islam yang multikultur. Penulis buku ini memang hanya mengambil PPMI Assalaam sebagai sampel pesantren di Solo. Bisa jadi hal ini menjadi kelemahan buku ini. namun sedikit banyak kita dapat menyimpulkan bahwa setiap lembaga pendidikan Islam (khususnya pesantren) mengusung misi *rahmatan lil'alam*. Tak sedikitpun pesantren mengajarkan keburukan apalagi untuk melawan perintah agama.

Buku ini setidaknya akan menjadi cerminan bagi kita, bahwa walaupun ada pesantren yang melahirkan alumni yang berpikiran radikal, tidak semua pesantren mengajarkan hal yang demikian, melainkan itu hanyalah segelintir pesantren yang ingin merusak citra Islam.

¹⁵ Abdullah Aly, *Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren (Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 338.

DAFTAR PUSTAKA

- Aly, Abdullah. 2011. *Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren (Telaah terhadap Kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Surakarta)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bank, James A. dan Cherry A. McGee (ed). 2001. *Handbook of Research on Multicultural Education*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Bisri, Mustofa. 2007. "Pesantren dan Pendidikan" dalam *Majalah Tebuireng*, Edisi 1 Tahun I Juli-September.
- Djauhari, Mohammad Tidjani. 2008. *Masa Depan Pendidikan Pesantren: Agenda yang Belum terselesaikan*. Jakarta: Taj Publishing.
- Ghofur, Saiful Amin. 2004. "Fenomena Ikatan Etnis di Pesantren" dalam *Majalah Klompen*, edisi II Juni-September.
- Mas'ud, Abdurrahman. 2007. "Memahami Agama Damai Dunia Pesantren" dalam Badrus Sholeh (ed), *Budaya Damai Komunitas Pesantren*. Jakarta: LP3ES.
- Munir, Misbahul. 2009. "Pesantren Kawah Candradimuka Pendidikan Multikultural", dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. I, No. 1, Juni.
- Nieto, Sonia. 2002. *Language, Culture and Teaching*. Mahwah, NJ: Lawrence Earlbaum.
- Parekh, Bikhu. 2000. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge: Harvard University Press.
- Suriasumantri, Jujun S. 1996. *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tilaar, H.A.R. 2002. "Multikulturalisme; Tantangan-Tantangan Global Masa Depan" dalam *Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.